



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2023 (REVISI)



KATA PENGANTAR

Revisi Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Tahun 2023 merupakan revisit atas laporan kinerja tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang berisi pertanggungjawaban kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Revisi laporan ini juga merupakan sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Puslitka sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya.

Revisi Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi acuan bagi penyempurnaan penyusunan rencana kinerja tahun mendatang, terutama dengan memperhatikan capaian kinerja Puslitka pada tahun sebelumnya. Semoga seluruh informasi dalam Revisi Laporan Kinerja Puslitka Tahun 2023 bermanfaat bagi penyempurnaan arah kebijakan pada bidang penelitian dan pengkajian perkara serta pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan kinerja Puslitka dalam mendukung Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 16 Juli 2024

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan
Pengelolaan Perpustakaan,

Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya



Digital Signature
mk44245849240716040308

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas dan Anggaran	3
C. Maksud dan Tujuan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Sasaran Strategis	11
C. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	18
B. Prestasi dan Capaian Lainnya	29
BAB IV PENUTUP	



Ikhtisar Capaian Kinerja yang Diperjanjikan pada Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Hasil Studi Perkara yang tepat waktu	90%	93.50%	103.89%
	2	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion)/Pertimbangan Hukum	80%	122%	153%
	3	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%	100%	125%
	4	Tingkat Layanan Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 81	Skor 81.16	100.20%
Capaian Strategis					120.52%

IKHTISAR EKSEKUTIF



Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan merupakan salah satu unit kerja pendukung yang mempunyai fungsi utama memberikan masukan dan data dukung kepada hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi dengan tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menyusun dan melaksanakan program kerja yang mengacu pada visi dan misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang diturunkan menjadi visi dan misi Puslitka, antara lain:

Tersedianya Referensi Substantif dalam Rangka Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Yang Modern dan Terpercaya

Visi tersebut diturunkan ke dalam misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengkajian perkara yang berkualitas sebagai referensi majelis hakim**
- 2. Mewujudkan referensi pustaka yang berbasis teknologi dan informasi**

Sementara, sasaran strategis Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Strategis Puslitka

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Tabel 2
Indikator Kinerja Puslitka

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Hasil Studi Perkara yang tepat waktu	90%
	2	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion)/Pertimbangan Hukum	80%
	3	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%
	4	Tingkat Layanan Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 81

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.173.001.000,- dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 38 orang.

Capaian Kinerja Pusat

Dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2022 terdiri dari 14 indikator, dengan rincian capaian strategis I sebesar 106.83% dan capaian strategis II sebesar 99.50%, dengan demikian nilai rata-rata capaian sebesar 103.16%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdiri dari satu sasaran dan empat indikator dengan capaian sebesar 120.52%, terdapat kenaikan sebesar 17.36% dibanding kinerja tahun lalu. Sedangkan dari aspek anggaran, Puslitka memiliki anggaran sebesar Rp. 3.173.001.000 dengan total penyerapan anggaran sesuai data di SIVIKA sebesar Rp. 3.172.949.469,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp 51.531,-.



2023

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Penjelasan Umum
- B. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas Dan Anggaran
- C. Maksud Dan Tujuan



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Pada tahun 1998, terbitnya Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pemerintah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Inpres tersebut mewajibkan kepada setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon IV, III, dan II mandiri ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan sebelumnya.

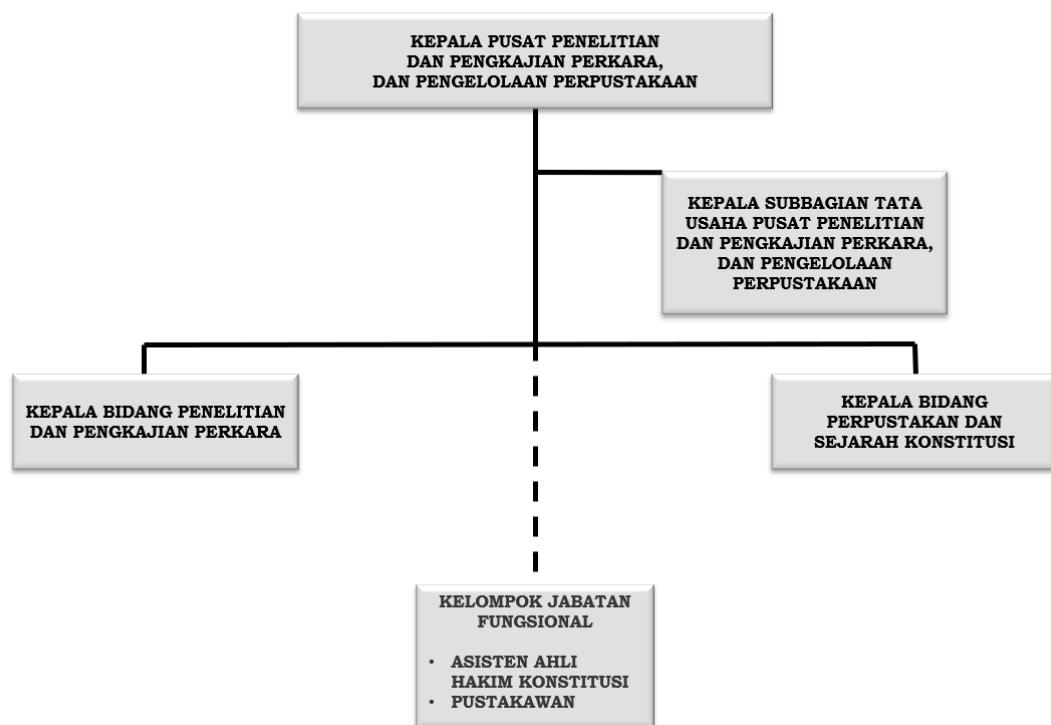
Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “Good Governance” yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan LAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Puslitka kepada semua pihak yang berkepentingan. Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas-tugas pokok Puslitka yang harus dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan stakeholders lainnya. Selain untuk memenuhi Akuntabilitas, Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Persekjen SOTK), di mana dalam Persekjen SOTK tersebut diatur bahwa dalam rangka membantu tugas teknis administratif dari Sekretariat Jenderal, dibentuk 5 (lima) biro dan 3 (tiga) pusat, yang salah satunya adalah Puslitka, yang memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi. Sesuai dengan Pasal 89 Persekjen SOTK, pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala ilmiah, serta penyusunan naskah akademis, seluruhnya ditujukan sebesar-besarnya untuk membantu dan mendukung terwujudnya putusan yang berkualitas pada setiap perkara.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang merupakan pejabat eselon II, dibantu 2 (dua) orang kepala bidang, yakni Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi yang merupakan pejabat eselon III, serta seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan yang merupakan pejabat eselon IV. Puslitka secara langsung menjadi rumah atau induk dari kelompok jabatan fungsional yakni jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan fungsional Pustakawan. Bagan struktur organisasi di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat digambarkan sebagaimana di bawah ini:





Persekjen SOTK mengatur bahwa Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah; pengelolaan terbitan berkala ilmiah serta penyusunan naskah akademik, sedangkan bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pelayanan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Ketatausahaan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

B. LINGKUNGAN STRATEGIS SDM, FASILITAS DAN ANGGARAN

Sumber daya manusia yang ada di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, yang terdiri atas 35 (tiga puluh lima) pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 3 (tiga) orang tenaga



pengelola jurnal dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan rincian sebagai berikut:

PEJABAT STRUKTURAL PUSLITKA

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	Kepala Pusat Puslitka	II. A	1 Orang
2.	Kepala Bidang	III. A	1 Orang
3.	Kepala Sub. Bagian	IV. A	1 Orang
Jumlah			3 Orang

PEJABAT FUNGSIONAL ASISTEN AHLI HAKIM KONSTITUSI

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya	8 Orang
2.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	16 Orang
Jumlah		24 Orang

PEJABAT FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Pustakawan Ahli Madya	2 Orang
2.	Pustakawan Ahli Muda	1 Orang
3.	Pustakawan Pelaksana Mahir	1 Orang
Jumlah		4 Orang

STAF PUSLITKA

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Staf Administrasi Puslitka	4 Orang
2.	Pengelola Jurnal Jurnal Konstitusi	1 Orang
3.	Pengelola Jurnal Constitutional Review	2 Orang
Jumlah		7 Orang



Pada tahun 2023 metode kerja dari 24 (dua puluh empat) Asisten Ahli Hakim Konstitusi terbagi menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang melekat di Hakim Konstitusi, sehingga mereka bekerja di lantai yang sama dengan Hakim Konstitusi, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berada di *center*, yaitu di lantai 8 (delapan) Gedung 1 Mahkamah Konstitusi bersama dengan pejabat struktural Puslitka, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, dan staff Puslitka, sedangkan ruang Perpustakaan berserta Pustakawannya berada di lantai 3 (tiga) Gedung 2 Mahkamah Konstitusi.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam tahun anggaran 2023 mendapat anggaran sebesar Rp. 3.173.001.000 dengan total penyerapan anggaran sesuai data di SIVIKA sebesar Rp. 3.172.949.469,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp 51.531,- dengan rincian sebagai berikut:

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
Langganan Jurnal Elektronik	150.423.000	150.389.475	33.525
Studi Tentang Hukum dan Konstitusi	448.772.000	448.768.513	3.487
Tinjauan Yuridis Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	39.820.000	39.819.156	844
Penyelenggaraan The 4th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) dan Kegiatan Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah	168.354.000	168.352.852	1.148
Kegiatan Kompilasi Pemikiran Hukum dan Konstitusi	665.053.000	665.030.892	4.108



Penyusunan Jurnal Konstitusi dan Consrev	654.596.000	654592.637	3.363
Pengadaan Buku dan Bahan Hukum Konstitusi dan Ketatanegaraan	146.001.000	146.000.989	11
Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Perpustakaan Konstitusi	50.000.000	49.999.713	287
Pengembangan IT Pusat Sejarah Konstitusi	300.000.000	299.999.930	70
Pemeliharaan dan Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Konten Pusat Sejarah Konstitusi	550.000.000	549.995.312	4.688
TOTAL	3.173.001.000	3.172.949.469	51.531

Penyusunan Revisi Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Penelitian, dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, yang merupakan unit eselon II di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Laporan pertanggungjawaban ditujukan untuk mengetahui dan mengukur capaian-capaian kinerja selama tahun 2023, dan juga sebagai bahan evaluasi, setelah mendapatkan detail kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang disusun, sehingga pada tahun berikutnya kinerja unit Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat ditingkatkan.

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan selama tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) yang telah disusun pada awal tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam



menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) yang bermanfaat bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang.



2023

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Sasaran Strategis dan Capaian Sasaran Strategis
- C. Perjanjian Kinerja



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam memberikan dukungan substantif kepada Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan yang akan dijalankan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam jangka waktu lima tahun (2020-2024). Rencana strategis (renstra) disusun dalam rangka meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi, dan program yang telah ditetapkan.

Renstra disusun dan ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penguatan stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam waktu lima tahun mendatang.

Visi Mahkamah Konstitusi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan di Mahkamah Konstitusi untuk turut serta mewujudkannya. Adapun Visi Mahkamah Konstitusi yang akan diwujudkan tahun 2020-2024 sebagai berikut.

MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA

Mahkamah Konstitusi menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi Mahkamah Konstitusi. Misi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut



Mahkamah Konstitusi menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi Mahkamah Konstitusi. Misi Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi

Penegakkan konstitusi akan dapat terwujud apabila seluruh institusi negara dan komponen bangsa memiliki integritas yang kuat, termasuk Mahkamah Konstitusi. Dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang memiliki integritas kuat, diperlukan sumber daya manusia yang religius, jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin, berdedikasi tinggi, serta bekerja keras, cerdas, dan tuntas serta menjaga keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara

Merupakan bagian terbesar dari cita-cita mewujudkan supremasi konstitusi. Untuk itulah, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 perlu terus menerus dilakukan seiring dengan peningkatan pemahaman mengenai mekanisme konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

3. Meningkatkan Kualitas Putusan

Melalui Putusan akan tergambar bagaimana Mahkamah Konstitusi mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam tiap-tiap perkara. Putusan yang berkualitas akan kongruen dengan menguatnya kepercayaan publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, manajemen penanganan perkara berbasis teknologi informasi, dan sumber daya aparatur pendukung yang berkualitas.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang menyangkut arah institusi ke depan. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan misi dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan atau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan



dan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh institusi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Visi dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan ialah:

**TERSEDINYA REFERENSI SUBSTANTIF DALAM RANGKA
MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI
PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Puslitka melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengkajian perkara yang berkualitas sebagai referensi majelis hakim**
- 2. Mewujudkan referensi pustaka yang berbasis teknologi dan informasi**

Revisi Renstra Mahkamah Konstitusi disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020, diantaranya menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan dukungan Struktur Organisasi yang terbaru.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi	1. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi	2. Terwujudnya Masyarakat Sadar	2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat



Warga Negara dan Penyelenggara Negara	Pancasila dan Konstitusi	terhadap Pancasila dan Konstitusi
3. Meningkatkan Kualitas Putusan	3. Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Implementatif	3. Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara

B. SASARAN STRATEGIS DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) yang merupakan bagian dari sasaran strategis Mahkamah Konstitusi disusun sebagai penjabaran dari 2 (dua) tujuan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja Puslitka. Sasaran strategis Puslitka sebagaimana pada tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2.

Sasaran Strategis Puslitka

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan



Sedangkan target kinerja jangka menengah Puslitka tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3.
Target Kinerja Jangka Menengah Puslitka Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	50%	60%	70%		
	2	Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%	80%	85%	90%	95%
	3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum / Pertimbangan Hukum	80%	80%	80%	80%	80%
	4	Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	60%	60%	60%		
	5	Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	80%	80%	80%	80%	80%
	6	Tingkat Layanan Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 81	Skor 83



C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang menggambarkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu satu tahun. Penetapan kinerja harus merupakan hasil kesepakatan antara pengembian tugas dengan atasannya (merupakan suatu performance agreement) dan telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan merupakan unit kerja yang mempunyai peran melakukan penelitian dan pengkajian mengenai masalah-masalah hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan. Selain itu, wilayah kerja perpustakaan juga merupakan tanggung jawab Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan karena fungsi perpustakaan sebagai pendukung literatur akademik dan keilmuan dalam menunjang kebutuhan referensi penanganan perkara.

Guna menjabarkan rencana strategis yang telah disusun oleh Mahkamah Konstitusi, maka disusun Penetapan Kinerja. Adapun dalam mewujudkan tujuan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, disusun serangkaian indikator pelaksanaan tugas dan kewenangan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat dilihat dalam tabel 2.4. berikut.



Table 2.4

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Hasil Studi Perkara yang tepat waktu	90%
		2	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion) / Pertimbangan Hukum.	80%
		3	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%
		4	Tingkat Layanan Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 81

Adapun keberhasilan indikator tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5

Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

Berikut pemaparan indikator kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan beserta analisis capaian yang telah direncanakan untuk tahun 2023 yaitu meliputi:



1. Sasaran Kegiatan Untuk Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi yaitu:

1.1. Persentase Hasil Studi Perkara yang tepat waktu

Studi Perkara sebagai tugas pokok Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berfungsi sebagai salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dan juga berfungsi untuk mempercepat proses penanganan perkara konstitusi yang cenderung bertambah setiap tahunnya. kajian perkara dilakukan untuk perkara pengujian undang-undang (PUU) dan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Kajian perkara pendahuluan berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan masukan bagi Hakim Konstitusi dalam persidangan pendahuluan guna memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sehingga permohonan yang diperiksa pada persidangan selanjutnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian perkara pendalaman adalah kegiatan mengkaji atau menganalisis suatu perkara konstitusi melalui berbagai macam metode, pendekatan, dan sudut pandang, sehingga diperoleh suatu studi yang komprehensif sebagai bahan referensi ilmiah bagi hakim dalam membuat pendapat hukum dan *draft* putusan Mahkamah. Indikator diukur dari jumlah kajian perkara pengujian undang-undang (PUU) dan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dibagi dengan perkara pengujian undang-undang (PUU) dan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang diregistrasi/diputus dikalikan 100%.

$$\text{Studi Perkara Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Studi Perkara PUU dan SKLN}}{\text{Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diregistrasi/Diputus}} \times 100\%$$



1.2. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion)

Penyusunan konsep pendapat hukum (*legal opinion*) adalah kegiatan menyusun pandangan dan pendirian Hakim Konstitusi terhadap suatu perkara konstitusi yang dibuat pada saat sebelum diputus oleh Mahkamah. Konsep pendapat hukum disiapkan untuk semua perkara berdasarkan atas kewenangan Mahkamah. Indikator diukur dari jumlah Pendapat hukum (*legal opinion*) atas perkara yang selesai pemeriksaan persidangan dan telah dibacakan putusannya dibagi jumlah perkara yang selesai pemeriksaan persidangan dan telah dibacakan putusannya dikalikan 100%.

$$\text{Penyusunan Konsep Pendapat Hukum (LO)} = \frac{\text{Jumlah LO yang disusun pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$$

1.3. Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi

Dukungan substantif yang dilakukan kepada Hakim Konstitusi adalah dalam bentuk dukungan referensi dalam penanganan perkara konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah permintaan referensi perkara yang terpenuhi dengan jumlah permintaan referensi. Indikator diukur dengan tingkat terpenuhinya permintaan referensi dalam penanganan perkara sepanjang tahun 2023 dibagi dengan jumlah permintaan referensi sepanjang 2023 dikalikan 100%.

$$\text{Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka} = \frac{\text{Jumlah Permintaan Referensi yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Permintaan Referensi}} \times 100\%$$



1.4. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Sasaran ini diukur dengan pelaksanaan survey pengukuran kinerja pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan penerima pada Pelayanan Penelitian Pengkajian dan Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi berada pada kategori Baik. Indikator diukur dari indeks survei dibagi target integritas dikalikan 100%.

$$\text{Tingkat Layanan Puslitka} = \frac{\text{Indeks Survei}}{\text{Target Integritas}} \times 100\%$$



2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Prestasi dan Capaian Lainnya



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, Puslitka membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun.

Pada Tahun 2023 Puslitka memperoleh capaian kinerja sebesar 120.52% lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Puslitka dikategorikan **“Berhasil”** melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Tahun 2023 Puslitka mengukur 4 (empat) indikator kinerja dari sasaran strategis. Dengan 1 (satu) sasaran output yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi, dengan rincian sebanyak 1 (satu) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil”, dan 3 (tiga) indikator dinyatakan “Berhasil”.

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 1
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil



Tabel 2
Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1 Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	90%	93.50%	103.89%	Berhasil
		2 Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%	122%	153%	Sangat Berhasil
		3 Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%	100%	125%	Berhasil
		4 Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 81	Skor 81.16	100.20%	Berhasil

Dengan demikian nilai **capaian kinerja rata-rata puslitka pada tahun 2023 adalah 120.52%**. Penjelasan dari pencapaian kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:
MENINGKATNYA KUALITAS PENANGANAN PERKARA



Pada sasaran strategis terdapat 4 indikator, target, realisasi dan capaiannya antara lain:

Tabel 3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
		1	Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	90%	93.50%	103.89%
		2	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%	122%	153%
		3	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%	100%	125%
		4	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 81	Skor 81.16	100.20%
Capaian						120.52%

1.1. Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat Waktu

Salah satu tugas pokok dari Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) adalah menyusun kajian perkara. Hasil kajian perkara menjadi salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi. Sehingga, penyusunan kajian perkara yang tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam upaya mempercepat proses penanganan perkara konstitusi yang fluktuatif setiap tahunnya. Selaras dengan hal tersebut, hakim konstitusi membutuhkan dukungan substantif yang cepat dan tepat dalam bentuk kajian perkara. Berdasarkan pola penempatan ASLI, kajian perkara pun terbagi



menjadi kajian pendahuluan (ASLI attach pada hakim konstitusi) dan kajian center (ASLI yang berada di Puslitka).

Pengkajian perkara pendahuluan adalah kegiatan menelaah atau menganalisis berkas permohonan. Aspek terkait dari segi sistematika penyusunan permohonan dan substansi permohonan, serta surat kuasa, daftar bukti, alat bukti dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Kajian perkara pendahuluan berfungsi sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi hakim konstitusi dalam persidangan pendahuluan. Kajian ini bertujuan untuk memberikan nasihat kepada para Pemohon dalam memperbaiki permohonannya. Sehingga, permohonan yang berjalan pada tahap persidangan selanjutnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dengan kajian pendahuluan, pengkajian perkara center adalah kegiatan mengkaji atau menganalisis suatu perkara konstitusi melalui berbagai macam metode, pendekatan dan sudut pandang. Sehingga, terdapat suatu kajian komprehensif sebagai bahan referensi ilmiah bagi hakim dalam membuat konsep pendapat hukum. Kajian center berfungsi sebagai bahan referensi ilmiah kepada majelis hakim konstitusi dalam memutus perkara konstitusi. Kajian ini dilakukan dengan studi kepustakaan melalui berbagai pendekatan dan sudut pandang. Sehingga, terdapat suatu kajian yang komprehensif sebagai bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam membuat konsep pendapat hukum.

Tabel 4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu
Tahun 2020 sd 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Hasil Kajian Perkara yang Tepat Waktu	2020	75%	97,25%	129,6%
	2021	80%	100%	125%
	2022	85%	91,5%	107%
	2023	90%	93,5%	103,89%



Perhitungan persentase realisasi hasil kajian perkara yang tepat waktu untuk kajian pendahuluan dan kajian pendalaman sebagai berikut:

$$\text{Persentase Hasil Studi Perkara Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Studi Perkara PUU dan SKLN}}{\text{Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diregistrasi/Diputus}} \times 100\%$$

Studi Pendahuluan :

$$\frac{\text{Jumlah Studi Pendahuluan Perkara PUU dan SKLN}}{\text{Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diregistrasi}} = \frac{168}{168} \times 100\% = 100\%$$

Studi Center:

$$\frac{\text{Jumlah Studi Center Perkara PUU dan SKLN}}{\text{Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diputus}} = \frac{146}{168} \times 100\% = 87\%$$

Dengan demikian perhitungan persentase realisasi hasil studi perkara yang tepat waktu sebagai berikut:

$$(\text{Realisasi persentase studi pendahuluan yang tepat waktu} + \text{Realisasi persentase studi center yang tepat waktu}) : 2 = (100\% + 87\%) : 2 = 93.50\%$$

Realisasi di atas mempunyai catatan, jika dilihat dari data di e-asli.mkri.id yang masih terdapat beberapa Studi Pendahuluan dan Studi Perkara yang



belum diunggah sehingga melewati batas waktu unggah, hal ini dikarenakan oleh Studi Pendahuluan dan Studi Perkara yang sudah jadi tidak segera langsung diunggah dalam laman, namun sudah tersedia dalam folder internal Puslitka dan/atau ASLI. Jadi sebenarnya target penyelesaian Studi Pendahuluan dan Studi Perkara tersebut tidak mengalami keterlambatan dari target yang ditetapkan. Hal ini hanya keterlambatan dalam mengunggah hasil studi ke dalam laman e-asli.mkri.id, dan bukan keterlambatan dalam penyelesaian hasil studinya. Namun demikian ke depan, hal tersebut akan dijadikan bahan evaluasi Puslitka untuk menyempurnakan kinerja administratifnya.

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase realisasi hasil kajian perkara yang tepat waktu, sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Kinerja Indikator 1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	90%	93.50%	103.89%

Pada tahun 2023, realisasi indikator Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu yaitu 103.89% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”. Jika dilihat dan dibandingkan dengan capaian sebelumnya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 seperti dalam Tabel 4 di atas, walaupun capaian Indikator Kinerja “Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu” di tahun 2023 menurun, namun tidak dapat dikatakan kinerjanya tidak berhasil, mengingat Puslitka menetapkan target yang berbeda (selalu meningkat setiap tahun), dan realisasinya selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan.



1.2. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).

Penyusunan konsep pendapat hukum (*legal opinion*) adalah kegiatan menyusun pandangan dan pendirian hakim konstitusi terhadap suatu perkara konstitusi yang dibuat sebelum Mahkamah memutus perkara konstitusi. Konsep pendapat hukum disiapkan untuk semua perkara berdasarkan atas kewenangan Mahkamah. Berdasarkan laporan dokumen pada e-asli.mkri.id terdapat dokumen LO sejumlah 166 konsep LO dari 136 jumlah Putusan.

$$\text{Persentase Penyusunan Konsep Pendapat Hukum (LO)} = \frac{\text{Jumlah LO yang Dibuat Pada Tahun 2023}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}} \times 100\%$$

Perhitungan persentase penyusunan konsep pendapat hukum (LO) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah LO yang Dibuat pada Tahun 2023}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}} = \frac{166}{136} \times 100\% = 122\%$$

Tabel 6
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal
Opinion)/Pertimbangan Hukum
Tahun 2020 sd 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion)/Pertimbangan Hukum	2020	80%	100%	125%
	2021	80%	100%	125%
	2022	80%	109%	136,25%
	2023	80%	122%	153%

Capaian kinerja indikator penyusunan konsep pendapat hukum (LO) tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 7

Capaian Kinerja Indikator 1.2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase Tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (LO)	80%	122%	153%

Realisasi indikator persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) yaitu 122%. Sehingga, capaian yang diperoleh sebesar 153%, masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.

Terhadap capaian ini dapat dijelaskan bahwa penghitungan capaian indikator konsep pendapat hukum (LO) masih mengabungkan antara konsep pendapat hukum (LO), konsep pendapat berbeda (DO), dan konsep alasan berbeda (CO). Agar penghitungan ini menjadi lebih optimal dan mendekati keadaan riil perlu dilakukan penghitungan secara terpisah ke depannya.

Jika dilihat dan dibandingkan dengan capaian sebelumnya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 seperti dalam Tabel 6 di atas, capaian Indikator Kinerja “Persentase Tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion)/Pertimbangan Hukum” di tahun 2023 meningkat. Namun demikian, Puslitka mendasarkan evaluasi secara internal belum memungkinkan untuk menaikkan target kinerjanya secara bertahap mendasarkan realisasi setiap tahun. Hal ini dikarenakan ada transisi perubahan cara kerja yang sebelumnya Peneliti menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) dan juga terdapat perubahan mekanisme kerja baru yang melibatkan langsung YM Hakim Konstitusi, di mana sebagian Tupoksi Puslitka harus disesuaikan dengan tupoksi Kepaniteraan sebagai akibat tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan penguatan mekanisme sistem kerja dan peralihan ASLI ke dalam Kepaniteraan.

1.3. Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi

Salah satu bentuk dukungan substantif yang dilakukan kepada hakim konstitusi adalah dalam bentuk dukungan referensi dalam penanganan perkara konstitusi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah permintaan



referensi penanganan perkara dengan ketersediaan bahan pustaka di perpustakaan baik yang sudah menjadi koleksi perpustakaan atau melalui mekanisme pengadaan yang disesuaikan dengan permintaan sepanjang Tahun 2023.

Dukungan referensi yang terpenuhi sesuai dengan ketersediaan koleksi di perpustakaan sejumlah 146 judul dibuktikan dengan data peminjaman bahan pustaka. Sedangkan pemenuhan dukungan referensi yang belum tersedia di

$$\text{Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka} = \frac{\text{Jumlah Permintaan Referensi yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Permintaan Referensi}} \times 100\%$$

perpustakaan, dipenuhi melalui mekanisme pengadaan dengan jumlah hasil pengadaan sebanyak 232 judul buku dan ebook.

Perhitungan persentase ketersediaan bahan pustaka sebagai berikut: Jumlah keseluruhan permintaan referensi buku baik fisik maupun e-book yang terpenuhi adalah sebanyak 378 judul dan jumlah permintaan referensi sebanyak 378 judul.

Sehingga rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah permintaan referensi yang terpenuhi}}{\text{Jumlah permintaan referensi}} = \frac{378}{378} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah permintaan referensi tersebut baik buku fisik maupun e-book, sehingga perhitungan capaian indikator kinerja persentase ketersediaan bahan pustaka, sebagai berikut:



Tabel 8
Capaian Kinerja Indikator 1.3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase kesesuaian bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	80%	100%	125%

Berdasarkan Tabel 8 di atas, pada tahun 2023, realisasi indikator Persentase kesesuaian bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi yaitu **100%**, sehingga capaian sebesar 125% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan **“Berhasil”**.

Diantara daftar buku referensi yg sering diminta oleh Hakim Konstitusi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. KUHP/KUH Perdata;

KUHP dan KUH Perdata juga seperti produk undang undang lainnya perpustakaan akan menyediakan sesuai dengan ketersediaan di pasaran, namun apabila undang undang tersebut sudah didaftarkan dalam gugatan pengujian undang undang di MK tentu akan diupayakan untuk didapatkan oleh Perpustakaan MK agar tetap dapat mendukung kinerja Hakim Konstitusi

2. KAMUS;

Kamus adalah sebuah buku berisi kata-kata dari sebuah bahasa, biasanya disusun secara alfabetis, disertai keterangan akan artinya ucapannya, ejaannya, dan sebagainya, sehingga untuk mendukung draft putusan yang menuangkan kata kata yang harus tepat sangat diperlukan kamus, Ketersediaan kamus sudah diantisipasi oleh Perpustakaan MK sejak MK berdiri, dalam perkembangan kinerja MK dalam melahirkan putusan putusan yang berkualitas dan akademis maka kamus disediakan dalam berbagai jenis dan Bahasa terutama kamus hukum , blacklaw juga kamus Bahasa Bahasa asing

3. Buku Tema Konstitusi ;

Selain menyediakan berbagai buku seperti diulas diatas Perpustakaan MK juga menyediakan berbagai buku ilmiah hukum, buku-buku yang bertemakan



kritikan atau komentar atas peraturan perundangan atau isu kekinian yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi,

Hal ini penting disediakan atas saran dan perintah YM Hakim Konstitusi agar selain hakim Konstitusi para pembantunya yaitu Panitera Penggati dan ASLI mampu memperluas nalar dan cara pandang terhadap satu fenomena hukum

4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Perdata/ Pidana
5. Teks Book yg terkait hukum dan Konstitusi misal praktek pemilu di negara lain, hukum internasional, HAM dan politik
6. Buku yang sesuai dengan perkara yang sedang berlangsung baik dalam bentuk buku maupun ebook.

Tabel 9
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka Bidang Hukum dan Konstitusi
Tahun 2020 sd 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka Bidang Hukum dan Konstitusi	2020	80%	100%	125%
	2021	80%	100%	125%
	2022	80%	100%	125%
	2023	80%	100%	125%

Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka Bidang Hukum dan Konstitusi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 stabil yaitu 125%, dapat dilihat di Tabel 9. Target yang ditetapkan juga sama sesuai dengan IKU yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Hal ini mendasarkan pertimbangan evaluasi internal Puslitka yang mana jumlah dan ragam bahan pustaka yang dibutuhkan melebihi kemampuan anggaran yang tersedia. Apabila ketersediaan anggaran tidak mencukupi maka tidak dapat dilakukan pengadaan atas permintaan bahan pustaka dari Hakim Konstitusi yang sangat tergantung dari kompleksitas perkara yang ditangani, sehingga permintaan bahan pustaka oleh Hakim Konstitusi bisa saja tidak terpenuhi seluruhnya di tahun yang sama. Realisasi setiap tahun mampu melebihi target



yang ditetapkan dikarenakan adanya dukungan optimalisasi anggaran yang ada dari kegiatan berbasis anggaran yang lainnya.

1.4. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Pelayanan Penelitian Pengkajian dan Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan berada pada kategori Baik, yaitu dengan range nilai rata-rata tertimbang nilai indeks 3,246 atau konversi IKM 81,16.

$$\text{Tingkat Layanan Puslitka} = \frac{\text{Indeks Survey}}{\text{Target Indeks}} \times 100\%$$

Perhitungan persentase tingkat layanan puslitka sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Indeks survey}}{\text{Target Indeks}} = \frac{81.16}{81} \times 100\% = 100,20\%$$

Tabel 10
Capaian Kinerja Indikator 1.4

No	Layanan Administrasi Umum	Target	Realisasi	Capaian
4	Indeks Layanan Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 81	81.16	100,20%

Sehingga indeks layanan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan dengan target skor 81, dan realisasi 81.16, maka capaian 100% dengan kategori “Baik”.



Nilai Unsur Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yaitu U1. Persyaratan Pelayanan 3,231 (Baik), U2. Prosedur Pelayanan 3,249 (Baik), U3. Waktu penyelesaian 3,227 (Baik), U4. Produk layanan 3,218 (Baik), U5. Kompetensi pelaksana 3,275 (Baik), U6. Perilaku pelaksana 3,293 (Baik), U7. Penanganan pengaduan 3,223 (Baik), U8. Sarana dan prasarana 3,255 (Baik).

Saran responden mengenai Survei Indeks Layanan Administrasi Umum pada Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai berikut: Dukungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan menyediakan Kajian Informasi Teknologi terkini, meningkatkan agar performa perpustakaan semakin baik, memperbanyak koleksi buku non hukum, dan koleksi buku anak, mengadakan acara di perpustakaan khusus untuk para pegawai untuk menarik minat membaca para pegawai, tertib administrasi dalam layanan pengelolaan perpustakaan, meningkatkan kompetensi pustakawan dalam memberikan dukungan referensi, perlunya fasilitas layanan untuk disabilitas, meningkatkan kualitas penambahan koleksi terkait perkara yang sedang ditangani, melaksanakan sosialisasi layanan dan koleksi perpustakaan, meningkatkan sarana fasilitas jaringan internet dan ruang diskusi, membuat kegiatan/event yang menarik untuk meningkatkan minat ke perpustakaan, dan mengembangkan koleksi digital dan kerjasama akses koleksi digital dengan perpustakaan lain.

Tabel 11
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara da Pengelolaan
Perpustakaan
Tahun 2020 sd 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara da Pengelolaan Perpustakaan	2020	Skor 75	Skor 83,68	111,57%
	2021	Skor 75	Skor 84	109,09%
	2022	Skor 79	Skor 79,185	100%
	2023	Skor 81	Skor 81,16	100,2%



Perbandingan capaian indikator kinerja Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Tabel 11) menggambarkan bahwa setiap tahun target ditetapkan hampir selalu meningkat berdasarkan hasil evaluasi secara internal. Pertanyaan survei untuk mengukur kinerja layanan selalu diperbaiki agar lebih tepat menggambarkan atau memotret layanan yang diberikan oleh Puslitka. Sehingga semakin bermanfaat untuk memberikan masukan ataupun sebagai evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

B. PRESTASI DAN CAPAIAN LAINYA

1. *Focus Group Discussion* “Konsep, Batasan, dan Kriteria Lembaga Negara yang Bersifat *Constitutional Importance*” internal MK

Kegiatan FGD ini adalah *Focus Group Discussion* dengan tema pembahasan “Konsep, Batasan, dan Kriteria Lembaga Negara yang Bersifat *Constitutional Importance*” internal yang dilaksanakan untuk memberikan pertimbangan, gambaran komprehensif baik yang bersifat filosofis, teoritis, praktis, maupun komparatif mengenai konsep, batasan, dan kriteria lembaga negara yang bersifat *constitutional importance* terkait perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi dan diselenggarakan dalam bentuk diskusi terbatas dengan mekanisme (1) pemaparan pakar/ahli; dan (2) diskusi dan tanya jawab.

Penerima manfaat dan peserta dari kegiatan ini secara langsung adalah Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan Pegawai Mahkamah Konstitusi yaitu terdiri: Panitera, Panitera Muda, Kapuslitka, Asisten Ahli Hakim Konstitusi; dan Panitera Pengganti Tingkat I dan II.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan dalam bentuk diskusi terbatas yang telah diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa - Rabu, 31 Oktober - 1 November 2023
Waktu : 09.00 WIB-selesai
Tempat : Ruang Aula Lantai Dasar, Gedung 2 Mahkamah Konstitusi,



Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110.

Dengan Narasumber yaitu: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., Prof.
Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M





2. Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional.

Bedah buku merupakan cara untuk menyampaikan informasi secara detail mengenai buku tersebut, yaitu dengan cara mendiskusikan dan mengkritik buku tersebut, kegiatan tersebut diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat luas atau khalayak, penggunaan gedung, dan sarana lainnya. Kegiatan Peluncuran Buku ini dilaksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 22 Juni 2023 bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional di gelar bedah buku 3 karya:

1. *Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H., M. H. berjudul Oligarki dan Totalitarianisme Baru*
2. *Dr. I Dewa Gede Palguna, S. H., M. Hum, Prof. Dr. Saldi Isra, S. H., Pan Mohamad Faiz, S. H., M. C. L., Ph. D. berjudul The Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia*
3. *Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S. H., M. Hum. berjudul Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi*



Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah: Internal : Pustakawan dan seluruh yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan, dan Eksternal : Para Peserta kegiatan bedah buku





3. **Workshop Penulisan Buku Dan Karya Tulis Ilmiah Bereputasi Global Tahun 2023**

Kegiatan Workshop Penulisan Buku dan Karya Tulis Ilmiah Bereputasi Global diselenggarakan oleh Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dilaksanakan pada Hari Kamis-Sabtu, Tanggal 7-9 Desember 2023 di Hotel Santika Harapan Indah Bekasi, Jawa Barat dengan Peserta Penulis Buku Tahun 2023 dan Pegawai Mahkamah Konstitusi, Panitia dan Pegawai yang sedang kuliah S2 dan S3 di Mahkamah Konstitusi baik secara luring dan Daring (Online).



Bentuk kegiatan ini adalah *workshop* dengan tema “Penulisan Buku dan Karya Tulis Ilmiah Bereputasi Global” yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis – Sabtu / 7 – 9 Desember 2023

Tempat : Hotel Santika Harapan Indah Bekasi

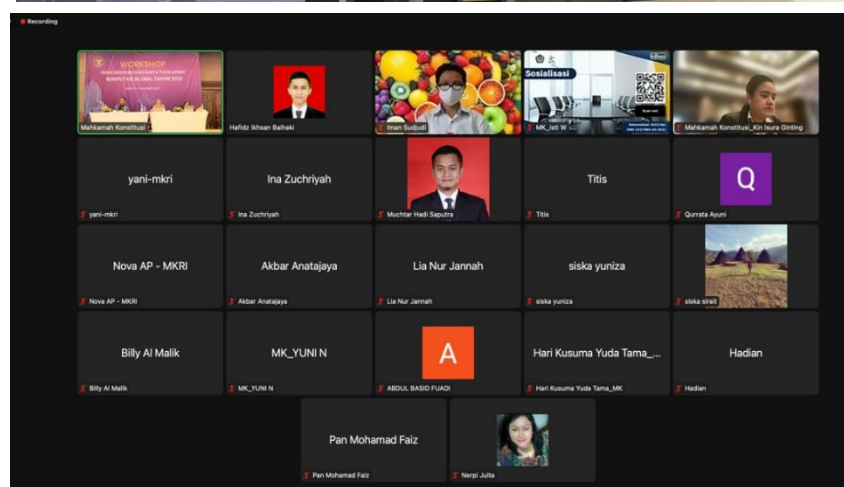
Jl. Harapan Indah Boulevard No.10-12, Medan
Satria, Kec. Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat
17131

Materi yang akan dibahas serta narasumber terkait terdiri dari:

1. Kiat Penulisan Buku (Perspektif Penerbit) oleh Yayat Sri Hayati (PT. Rajawali Press);
2. Strategi Penulisan Buku (Perspektif Akademik dan Pasar) oleh Embun Tiur Tantra (PT. Rajawali Press);
3. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Internasional oleh Dr. Qurrata Ayuni, S.H., MCDR (Akademisi);



Dengan Peserta Kegiatan ini akan diikuti oleh para penulis buku, pustakawan, pengelola Jurnal Konstitusi dan *Constitutional Review* yang merupakan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



4. Pelaksanaan Kegiatan Workshop Kepemanduan dan *Public Speaking*.

Penyelenggaraan kegiatan Workshop Kepemanduan dan *Public Speaking* dengan bentuk kegiatan pelatihan yaitu:

- 1) Menyediakan tempat kegiatan di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Gedung 2 Mahkamah Konstitusi dan Gedung Puskon MK.
- 2) Mengundang Narasumber dari Penyedia Jasa Pelatihan Kepemanduan dan *Public Speaking*
- 3) Materi Workshop
 - *Public Speaking goals*
 - *Audience Interactive Tools*
 - *Intonation Technique*
 - *Powerfull Posture*
 - *Handling Distraction*
 - *Showcase*
- (4) Memfasilitasi Narasumber dan Peserta Kegiatan Workshop Kepemanduan dan *Public Speaking*.
- (5) Membuat Laporan Kegiatan.

Kegiatan Workshop Kepemanduan dan *Public Speaking* diharapkan dapat mencapai beberapa maksud dan tujuan, antara lain adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Pegawai Peserta workshop
- Meningkatkan Kompetensi Petugas (Pustakawan, Pranata IT, Pranata Humas dan Protokol, Analis Ketatausahaan Puslitka, Tenaga Pengaman)
- Meningkatkan Kualitas Layanan Kunjungan Mahkamah Konstitusi
- Meningkatkan Koordinasi antar Unit Kerja yang terlibat dalam Pelayanan Kunjungan Mahkamah Konstitusi dan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi.



Workshop Kepemanduan dan *Public Speaking* in dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu- Kamis, 15 – 16 Maret 2023

Tempat. : Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Lantai 3 Gedung 2
dan Pusat Sejarah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Lantai
5 dan 6 Gedung 1 Mahkamah Konstitusi

Waktu : Pukul 08.00 WIB – selesai.

Peserta kegiatan Workshop Pengelolaan dan Penulisan Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional dan Terindeks Global Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI terdiri dari para pengelola Jurnal Konstitusi dan *Constitutional Review* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah (Pustakawan, Pranata IT, Pranata Humas dan Protokol, Analis Ketatausahaan Puslitka, Tenaga Pengaman).





5. Peluncuran Buku Dan Talk Show Literasi Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2023

Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan adanya suasana akademisi dan keberanian dan kepercayaan diri Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi dan masyarakat pada umumnya untuk menuangkan gagasan dan pemikiran mengenai berbagai macam isu kontekstual hukum dan konstitusi.



Peserta yang menghadiri acara Peluncuran Buku dan Talkshow Literasi Konstitusi ini adalah:

1. Hakim Konstitusi
2. Pakar/Ahli Hukum Tata Negara
3. Akademisi
4. Praktisi
5. Pejabat Lembaga Negara
6. Mahasiswa.

Tujuan Kegiatan Peluncuran Buku dan Talkshow Literasi Konstitusi ini dilaksanakan adalah untuk:

- Meningkatkan kultur dan tradisi akademik di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan dukungan substansi pada MK dalam bentuk menambah bahan pustaka dalam rangka pengayakan referensi dalam penyusunan konsep putusan.
- Menambah publikasi ilmiah bagi Hakim Konstitusi dan pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- Menambah wawasan dan informasi akademik dari buku-buku yang disusun serta mengetahui informasi si penulis buku
- Mengkaji metode dalam menyampaikan pesan akademik melalui diskusi akademik;
- Sebagai media publikasi bagi mahasiswa dan para akademisi.

Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, pada:

Hari/ Tanggal	: Rabu, 22 November 2023
Pukul	: 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Auditorium Perpustakaan Nasional RI Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat



Kegiatan ini diselenggarakan secara luring dan daring, yakni disiarkan melalui link zoom dan youtube streaming.





6. Pendidikan dan Pelatihan Tata Kelola Terbitan Ilmiah Tahun 2023

Karya Tulis Ilmiah merupakan hasil akhir (output) dalam proses menyusun suatu karya ilmiah. Publikasi karya tulis ilmiah ke dalam bentuk jurnal menjadi hal yang penting dalam upaya diseminasi hasil pemikiran yang telah dituangkan penulis dalam bentuk karya tulis ilmiah sehingga dapat diketahui dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu tata kelola jurnal yang baik dan benar menjadi faktor esensial dalam dunia akademis.

Tujuan utama kegiatan ini untuk memberikan pengayaan ilmu dan pelatihan dalam pengelolaan terbitan ilmiah, seperti menggunakan Open Journal System (OJS), menggunakan Reference Manager Mendeley, dan



aktivitas pengelolaan terbitan ilmiah lainnya bagi para pengelola Jurnal Konstitusi dan Constitutional Review serta calon pengelola yang merupakan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; menambah wawasan terkait bagaimana tata kelola jurnal ilmiah yang baik dan benar; serta adanya peningkatan akreditasi Jurnal Konstitusi dan Quartile Constitutional Review pada Scimago Journal Rank (SJC). Kegiatan ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan tata kelola jurnal yang sudah berjalan, serta dapat memperbaiki kualitas dan mempercepat proses penerbitan Jurnal Konstitusi dan Constitutional Review.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tata Kelola Terbitan Ilmiah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis s.d Sabtu / 11-13 Mei 2023
Tempat : Hotel Episode - Gading Serpong, Tangerang
Waktu : 14.00 s.d selesai.

Materi yang akan dibahas adalah Tata Kelola Jurnal dan Etika Pengelolaan Jurnal, Manajemen Jurnal dan Artikel (Workflow, Handling, dan Publishing), Penggunaan Open Jurnal System Versi 3, dan Manajemen Sitasi dan Referensi dengan Mendeley dengan narasumber terdiri dari:

- Materi Tata Kelola Jurnal dan Etika Pengelolaan Jurnal oleh Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D:
 - Ketua Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia
 - Editor in Chief Brawijaya Law Journal
- Materi Manajemen Jurnal dan Artikel (Workflow, Handling, dan Publishing) oleh Ahsan Yunus, S.H., M.H.:
 - Managing Editor Hasanuddin Law Review
- Materi Penggunaan Open Jurnal System Versi 3 oleh Mochammad Tanzil Multazam, M.Kn:
 - Koordinator Bidang Sertifikasi APJH.
- Materi Manajemen Sitasi dan Referensi dengan Mendeley oleh Ridwan Arifin, S.H., LL.M.:
 - Ketua Satuan Gugus Tugas Pengelolaan Jurnal UNNES



- Managing Editor of JILS

Kegiatan akan diikuti oleh para pengelola Jurnal Konstitusi dan Constitutional Review serta calon pengelola yang merupakan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.





7. Penyelenggaraan Kegiatan The 6th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS)

Kegiatan The 6th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) dilaksanakan secara serentak dalam International Chief Justice Forum (ICJF) yang menghadirkan para hakim Mahkamah Konstitusi dan peradilan sejenis dari berbagai negara. Selain itu, kegiatan ini dilakukan melalui Konferensi Internasional yang dilakukan secara daring dan luring (hybrid).

The 6th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) menghasilkan tulisan dan bahan untuk mengulas berbagai hukum konstitusi aktual yang saat ini sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dan dapat digunakan sebagai basis data dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, berbagai tulisan yang terkumpul menjadi bahan naskah untuk jurnal Constitutional Review edisi berikutnya.

The 6th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) memberikan pemahaman, hasil tertulis, serta kajian yang komprehensif dan integratif mengenai isu-isu kontekstual terkait "Mahkamah Konstitusi dan Independensi Peradilan: Sebuah Perspektif Perbandingan" yang



akan bermanfaat bagi para Hakim, Peneliti, Panitera Pengganti, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas dan reputasi Call for Papers, Panitia mengundang 5 (lima) pembicara dan yang memiliki rekam jejak publikasi internasional yang terkait dengan tema "Mahkamah Konstitusi dan Independensi Peradilan"

Peserta kegiatan the 6th Indonesian Constitutional Court International Symposium (The 6th ICCIS), selain dari para narasumber yang sudah disebutkan di atas, terdapat juga para selected speakers, respondent dan observers, antara lain: Nama Speaker the 6th ICCIS yaitu:

1. Senior Associate Justice Marvic Mario Victor Famorca Leonen
2. Professor Tim Lindsey
3. Professor Sang-Hyeon Jeon
4. Professor Simon Butt
5. Professor Mirza Satria Buana
6. Professor Manuel Adrián Merino Menjiva
7. Prof. Zoltán Szente
8. Dr. Idul Rishan
9. Dr. Mónica Castillejos-Aragón
10. Fritz Edward Siregar, Ph.D.
11. Cekli Setya Pratiwi
12. Osayd Awawda, Ph.D.
13. Justin B. Apperson

Respondents : Para Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) Mahkamah Konstitusi sebanyak 15 (lima belas) orang

Observers (pengamat) : Peserta Umum mendaftar baik yang diundang yaitu dari Asisten

Ahli Mahkamah Konstitusi, mahasiswa dan dosen dari berbagai Fakultas

- Kata Sambutan: Prof. Saldi Isra, S.H., MPA.
- Honorary Speech : Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H.
- Kata Penutup: Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H.



- Pembicara Undangan 5 (Lima) orang
- Pembicara Terpilih 10 (Sepuluh) orang
- Responden : 23 (dua puluh tiga) orang

Tema Utama: “Mahkamah Konstitusi dan Independensi Peradilan: Sebuah Perspektif Perbandingan”.

Sub-tema:

- Independensi Mahkamah Konstitusi di Era Demokrasi
- Independensi Hakim Konstitusi dalam Proses Pengambilan Keputusan.
- Ancaman terhadap Independensi Peradilan yang Ditimbulkan oleh Gerakan Populis.
- Anggaran dan Kemandirian Keuangan Mahkamah Konstitusi Kinerja Mahkamah Konstitusi dan Independensi Aparat Peradilan

Di sisi lain, kegiatan ini juga mengundang Mahkamah Konstitusi di Asia untuk turut serta dalam kegiatan ini. Hukum se-Indonesia, APHTN- HAN dan APHAMKA, dll. Selain itu kegiatan ini juga mengundang Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di Asia untuk mengikuti kegiatan The 6th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) ini yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu- Sabtu, 9-12 Agustus 2023

Tempat : Pullman Central Park Hotel





8. Kegiatan Konsinyering Penyusunan Dokumen Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi.

Penyusunan dokumen kebutuhan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ASLI menjadi hal penting bagi kejelasan, keberlangsungan, dan kemanfaatan



jabatan tersebut di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Tindak lanjut penyusunan berbagai dokumen jabatan terkait serta pembentukan Instansi Pembina menjadikannya prioritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengingat tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional ASLI akan memberikan dampak langsung bagi Hakim Konstitusi dan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan berencana akan melaksanakan Kegiatan “Konsinyering Penyusunan Dokumen Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi” sebagaimana dimaksud di atas. Kegiatan ini juga turut melibatkan pihak eksternal yang berasal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar Mahkamah Konstitusi mendapatkan pemahaman langsung terkait pembinaan Jabatan Fungsional ASLI di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Maksud dan Tujuan kegiatan Konsinyering “Penyusunan Dokumen Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi” adalah:

- 1) Menyusun dokumen kebutuhan Instansi Pembina yang sesuai dengan karakteristik Jabatan Fungsional ASLI;
- 2) Merumuskan bentuk peningkatan dukungan substantif ASLI bagi Hakim Konstitusi;
- 3) Meningkatkan kompetensi pegawai terkait tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional ASLI di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- 4) Memberikan gambaran bagi penyusunan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Konsinyering “Penyusunan Dokumen Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi” yang dilaksanakan Pada



Hari/ Tanggal : Kamis- Sabtu, 19- 21 Oktober 2023

Tempat : Hotel Novotel Tangerang.

Penerima manfaat dan peserta dari kegiatan ini secara langsung adalah Asisten Ahli Hakim Konstitusi, pegawai di Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan perwakilan Analis Hukum Kepaniteraan dan Tim Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Secara tidak langsung, kegiatan ini akan dapat memberikan pemahaman terkait regulasi dan kebutuhan dokumen kerja Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi atau JF ASLI serta memberikan gambaran terkait pembinaan jabatan fungsional yang kelak akan dikelola oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Pembina Jabatan Fungsional ini.





9. Kegiatan Pameran dan Pojok Konstitusi ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan pada Festival Wasur Kampung Konstitusi

Pelaksanaan pameran dan pojok konstitusi ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan pada Festival Wasur Kampung Konstitusi yang diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Musamus dan Kampung Wasur, Merauke - Papua. Alasan Kampung Wasur ditunjuk menjadi tempat kegiatan dimana pada Tahun 2013, Kampung Wasur dikukuhkan sebagai salah satu Kampung Pancasila dan Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh Universitas Musamus.

Pengukuhan sebagai Kampung Pancasila dan Konstitusi ini bertujuan agar masyarakat Kampung Wasur lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Pada Tahun 2023, Mahkamah Konstitusi hadir di Kampung Wasur dalam acara Festival Wasur Kampung Konstitusi untuk kembali mengajak warga masyarakat Kampung Wasur dan sekitarnya agar lebih meningkatkan kesadaran berkonstitusi, saling menghormati, saling menyayangi, saling berbagi, mencintai adat dan budaya, dan memiliki semangat cinta tanah air.

Peserta pameran adalah Mahkamah Konstitusi, berbagai UMKM lokal yang mengisi 50 Stand terdiri dari para pengrajin peralatan tradisional, makanan tradisional dan souvenir khas Wasur dan sekitarnya.

Pengunjung pada acara Festival ini terdiri atas masyarakat yang berdomisili di Kampung Wasur, kampung yang berdekatan dengan Kampung



Wasur, mahasiswa, siswa SD, SMP dan SMA Wasur dan sekitarnya serta Komunitas Peduli Lingkungan dan lainnya.

Jumlah pengunjung yang tercatat di stand Mahkamah Konstitusi selama 2 (dua) hari kegiatan berjumlah 875 orang.

Pada rangkaian kegiatan ini, Mahkamah Konstitusi juga menyerahkan satu paket fasilitas layanan informasi dan literasi berupa Pojok Konstitusi yang terdiri dari 2 (dua) buah rak lemari buku dan buku- buku yang ditempatkan di balai kampung Wasur.

Penyelenggaraan Festival Wasur Kampung Konstitusi yang diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat dan Sabtu tanggal 7-8 Juli 2023,
Waktu : pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIT
Tempat : Kampung Wasur, Merauke, Papua Selatan.







10. Hasil Akreditasi Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan penilaian Akreditasi Perpustakaan telah menetapkan bahwa Perpustakaan Mahkamah Konstitusi telah terakreditasi “A” dengan rekomendasi sebagai berikut:

10.1 Perlu penanganan koleksi jurnal dan koleksi khusus dengan lebih baik.

- Perlu peningkatan jumlah rata-rata pengunjung dan buku yang dipinjam. Perlu meningkatkan kemampuan layanan jurnal ilmiah non MK (selain terbitan MK).
- Perlu peningkatan jumlah tenaga perpustakaan dengan status pustakawan (Fungsional/Profesional).
- Perlu peningkatan persentase anggaran perpustakaan dari keseluruhan anggaran instansi induk, diluar belanja pegawai dan modal serta perlu peningkatan jumlah dana partisipasi masyarakat/sumbangan yang tidak mengikat.
- Perlu peningkatan jumlah prestasi perpustakaan.
- Perlu mempertahankan sarana prasarana yang sudah ada.





Nomor : B.3927/4.1/PPM.02/VII.2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 lembar sertifikat
Hal : Hasil Akreditasi Perpustakaan

Jakarta, 10 Juli 2023

Yth. Kepala Perpustakaan Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No 6, Gambir
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Dengan hormat,
Berdasarkan penilaian Akreditasi Perpustakaan - Perpustakaan Nasional RI menetapkan bahwa:

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi: terakreditasi A

Kami ucapkan selamat atas prestasi perpustakaan yang Saudara pimpin. Berikut surat ini pula kami sertakan Sertifikat Akreditasi Perpustakaan. Sebagai rekomendasi Perpustakaan Mahkamah Konstitusi agar dapat melakukan peningkatan sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan koleksi jurnal dan koleksi khusus dengan lebih baik.
2. Perlu peningkatan jumlah rata-rata pengunjung dan buku yang dipinjam. Perlu meningkatkan kemampuan layanan jurnal ilmiah non MK (selain terbitan MK).
3. Perlu peningkatan jumlah tenaga perpustakaan dengan status pustakawan (Fungsional/profesional).
4. Perlu peningkatan persentase anggaran perpustakaan dari keseluruhan anggaran instansi induk, di luar belanja pegawai dan Modal serta perlu peningkatan jumlah dana partisipasi masyarakat/sumbangan yang tidak mengikat.
5. Perlu peningkatan jumlah prestasi perpustakaan.
6. Perlu mempertahankan sarana prasarana yang sudah ada.

Atas kerjasama yang baik kami sampaikan terimakasih.

Direktur Standardisasi dan Akreditasi,



Supriyanto

Tembusan :

1. Kepala Perpustakaan Nasional RI
2. Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

Alamat: D. Suberdjo Raya No. 23A, Jakarta Pusat - Indonesia - 10160
Telp: (021) 9207765, 9207766, 9207767, 9207768, 9207769, 9207770, 9207771, 9207772, 9207773, 9207774, 9207775, 9207776, 9207777, 9207778, 9207779, 9207780, 9207781, 9207782, 9207783, 9207784, 9207785, 9207786, 9207787, 9207788, 9207789, 9207790, 9207791, 9207792, 9207793, 9207794, 9207795, 9207796, 9207797, 9207798, 9207799, 9207800, 9207801, 9207802, 9207803, 9207804, 9207805, 9207806, 9207807, 9207808, 9207809, 9207810, 9207811, 9207812, 9207813, 9207814, 9207815, 9207816, 9207817, 9207818, 9207819, 9207820, 9207821, 9207822, 9207823, 9207824, 9207825, 9207826, 9207827, 9207828, 9207829, 9207830, 9207831, 9207832, 9207833, 9207834, 9207835, 9207836, 9207837, 9207838, 9207839, 9207840, 9207841, 9207842, 9207843, 9207844, 9207845, 9207846, 9207847, 9207848, 9207849, 9207850, 9207851, 9207852, 9207853, 9207854, 9207855, 9207856, 9207857, 9207858, 9207859, 9207860, 9207861, 9207862, 9207863, 9207864, 9207865, 9207866, 9207867, 9207868, 9207869, 9207870, 9207871, 9207872, 9207873, 9207874, 9207875, 9207876, 9207877, 9207878, 9207879, 9207880, 9207881, 9207882, 9207883, 9207884, 9207885, 9207886, 9207887, 9207888, 9207889, 9207890, 9207891, 9207892, 9207893, 9207894, 9207895, 9207896, 9207897, 9207898, 9207899, 9207900, 9207901, 9207902, 9207903, 9207904, 9207905, 9207906, 9207907, 9207908, 9207909, 9207910, 9207911, 9207912, 9207913, 9207914, 9207915, 9207916, 9207917, 9207918, 9207919, 9207920, 9207921, 9207922, 9207923, 9207924, 9207925, 9207926, 9207927, 9207928, 9207929, 9207930, 9207931, 9207932, 9207933, 9207934, 9207935, 9207936, 9207937, 9207938, 9207939, 9207940, 9207941, 9207942, 9207943, 9207944, 9207945, 9207946, 9207947, 9207948, 9207949, 9207950, 9207951, 9207952, 9207953, 9207954, 9207955, 9207956, 9207957, 9207958, 9207959, 9207960, 9207961, 9207962, 9207963, 9207964, 9207965, 9207966, 9207967, 9207968, 9207969, 9207970, 9207971, 9207972, 9207973, 9207974, 9207975, 9207976, 9207977, 9207978, 9207979, 9207980, 9207981, 9207982, 9207983, 9207984, 9207985, 9207986, 9207987, 9207988, 9207989, 9207990, 9207991, 9207992, 9207993, 9207994, 9207995, 9207996, 9207997, 9207998, 9207999, 9208000, 9208001, 9208002, 9208003, 9208004, 9208005, 9208006, 9208007, 9208008, 9208009, 9208010, 9208011, 9208012, 9208013, 9208014, 9208015, 9208016, 9208017, 9208018, 9208019, 9208020, 9208021, 9208022, 9208023, 9208024, 9208025, 9208026, 9208027, 9208028, 9208029, 9208030, 9208031, 9208032, 9208033, 9208034, 9208035, 9208036, 9208037, 9208038, 9208039, 9208040, 9208041, 9208042, 9208043, 9208044, 9208045, 9208046, 9208047, 9208048, 9208049, 9208050, 9208051, 9208052, 9208053, 9208054, 9208055, 9208056, 9208057, 9208058, 9208059, 9208060, 9208061, 9208062, 9208063, 9208064, 9208065, 9208066, 9208067, 9208068, 9208069, 9208070, 9208071, 9208072, 9208073, 9208074, 9208075, 9208076, 9208077, 9208078, 9208079, 9208080, 9208081, 9208082, 9208083, 9208084, 9208085, 9208086, 9208087, 9208088, 9208089, 9208090, 9208091, 9208092, 9208093, 9208094, 9208095, 9208096, 9208097, 9208098, 9208099, 9208100, 9208101, 9208102, 9208103, 9208104, 9208105, 9208106, 9208107, 9208108, 9208109, 9208110, 9208111, 9208112, 9208113, 9208114, 9208115, 9208116, 9208117, 9208118, 9208119, 9208120, 9208121, 9208122, 9208123, 9208124, 9208125, 9208126, 9208127, 9208128, 9208129, 9208130, 9208131, 9208132, 9208133, 9208134, 9208135, 9208136, 9208137, 9208138, 9208139, 9208140, 9208141, 9208142, 9208143, 9208144, 9208145, 9208146, 9208147, 9208148, 9208149, 9208150, 9208151, 9208152, 9208153, 9208154, 9208155, 9208156, 9208157, 9208158, 9208159, 9208160, 9208161, 9208162, 9208163, 9208164, 9208165, 9208166, 9208167, 9208168, 9208169, 9208170, 9208171, 9208172, 9208173, 9208174, 9208175, 9208176, 9208177, 9208178, 9208179, 9208180, 9208181, 9208182, 9208183, 9208184, 9208185, 9208186, 9208187, 9208188, 9208189, 9208190, 9208191, 9208192, 9208193, 9208194, 9208195, 9208196, 9208197, 9208198, 9208199, 9208200, 9208201, 9208202, 9208203, 9208204, 9208205, 9208206, 9208207, 9208208, 9208209, 9208210, 9208211, 9208212, 9208213, 9208214, 9208215, 9208216, 9208217, 9208218, 9208219, 9208220, 9208221, 9208222, 9208223, 9208224, 9208225, 9208226, 9208227, 9208228, 9208229, 9208230, 9208231, 9208232, 9208233, 9208234, 9208235, 9208236, 9208237, 9208238, 9208239, 9208240, 9208241, 9208242, 9208243, 9208244, 9208245, 9208246, 9208247, 9208248, 9208249, 9208250, 9208251, 9208252, 9208253, 9208254, 9208255, 9208256, 9208257, 9208258, 9208259, 9208260, 9208261, 9208262, 9208263, 9208264, 9208265, 9208266, 9208267, 9208268, 9208269, 9208270, 9208271, 9208272, 9208273, 9208274, 9208275, 9208276, 9208277, 9208278, 9208279, 9208280, 9208281, 9208282, 9208283, 9208284, 9208285, 9208286, 9208287, 9208288, 9208289, 9208290, 9208291, 9208292, 9208293, 9208294, 9208295, 9208296, 9208297, 9208298, 9208299, 9208300, 9208301, 9208302, 9208303, 9208304, 9208305, 9208306, 9208307, 9208308, 9208309, 9208310, 9208311, 9208312, 9208313, 9208314, 9208315, 9208316, 9208317, 9208318, 9208319, 9208320, 9208321, 9208322, 9208323, 9208324, 9208325, 9208326, 9208327, 9208328, 9208329, 9208330, 9208331, 9208332, 9208333, 9208334, 9208335, 9208336, 9208337, 9208338, 9208339, 9208340, 9208341, 9208342, 9208343, 9208344, 9208345, 9208346, 9208347, 9208348, 9208349, 9208350, 9208351, 9208352, 9208353, 9208354, 9208355, 9208356, 9208357, 9208358, 9208359, 9208360, 9208361, 9208362, 9208363, 9208364, 9208365, 9208366, 9208367, 9208368, 9208369, 9208370, 9208371, 9208372, 9208373, 9208374, 9208375, 9208376, 9208377, 9208378, 9208379, 9208380, 9208381, 9208382, 9208383, 9208384, 9208385, 9208386, 9208387, 9208388, 9208389, 9208390, 9208391, 9208392, 9208393, 9208394, 9208395, 9208396, 9208397, 9208398, 9208399, 9208400, 9208401, 9208402, 9208403, 9208404, 9208405, 9208406, 9208407, 9208408, 9208409, 9208410, 9208411, 9208412, 9208413, 9208414, 9208415, 9208416, 9208417, 9208418, 9208419, 9208420, 9208421, 9208422, 9208423, 9208424, 9208425, 9208426, 9208427, 9208428, 9208429, 9208430, 9208431, 9208432, 9208433, 9208434, 9208435, 9208436, 9208437, 9208438, 9208439, 9208440, 9208441, 9208442, 9208443, 9208444, 9208445, 9208446, 9208447, 9208448, 9208449, 9208450, 9208451, 9208452, 9208453, 9208454, 9208455, 9208456, 9208457, 9208458, 9208459, 9208460, 9208461, 9208462, 9208463, 9208464, 9208465, 9208466, 9208467, 9208468, 9208469, 9208470, 9208471, 9208472, 9208473, 9208474, 9208475, 9208476, 9208477, 9208478, 9208479, 9208480, 9208481, 9208482, 9208483, 9208484, 9208485, 9208486, 9208487, 9208488, 9208489, 9208490, 9208491, 9208492, 9208493, 9208494, 9208495, 9208496, 9208497, 9208498, 9208499, 9208500, 9208501, 9208502, 9208503, 9208504, 9208505, 9208506, 9208507, 9208508, 9208509, 9208510, 9208511, 9208512, 9208513, 9208514, 9208515, 9208516, 9208517, 9208518, 9208519, 9208520, 9208521, 9208522, 9208523, 9208524, 9208525, 9208526, 9208527, 9208528, 9208529, 9208530, 9208531, 9208532, 9208533, 9208534, 9208535, 9208536, 9208537, 9208538, 9208539, 9208540, 9208541, 9208542, 9208543, 9208544, 9208545, 9208546, 9208547, 9208548, 9208549, 9208550, 9208551, 9208552, 9208553, 9208554, 9208555, 9208556, 9208557, 9208558, 9208559, 9208560, 9208561, 9208562, 9208563, 9208564, 9208565, 9208566, 9208567, 9208568, 9208569, 9208570, 9208571, 9208572, 9208573, 9208574, 9208575, 9208576, 9208577, 9208578, 9208579, 9208580, 9208581, 9208582, 9208583, 9208584, 9208585, 9208586, 9208587, 9208588, 9208589, 9208590, 9208591, 9208592, 9208593, 9208594, 9208595, 9208596, 9208597, 9208598, 9208599, 9208600, 9208601, 9208602, 9208603, 9208604, 9208605, 9208606, 9208607, 9208608, 9208609, 9208610, 9208611, 9208612, 9208613, 9208614, 9208615, 9208616, 9208617, 9208618, 9208619, 9208620, 9208621, 9208622, 9208623, 9208624, 9208625, 9208626, 9208627, 9208628, 9208629, 9208630, 9208631, 9208632, 9208633, 9208634, 9208635, 9208636, 9208637, 9208638, 9208639, 9208640, 9208641, 9208642, 9208643, 9208644, 9208645, 9208646, 9208647, 9208648, 9208649, 9208650, 9208651, 9208652, 9208653, 9208654, 9208655, 9208656, 9208657, 9208658, 9208659, 9208660, 9208661, 9208662, 9208663, 9208664, 9208665, 9208666, 9208667, 9208668, 9208669, 9208670, 9208671, 9208672, 9208673, 9208674, 9208675, 9208676, 9208677, 9208678, 9208679, 9208680, 9208681, 9208682, 9208683, 9208684, 9208685, 9208686, 9208687, 9208688, 9208689, 9208690, 9208691, 9208692, 9208693, 9208694, 9208695, 9208696, 9208697, 9208698, 9208699, 9208700, 9208701, 9208702, 9208703, 9208704, 9208705, 9208706, 9208707, 9208708, 9208709, 9208710, 9208711, 9208712, 9208713, 9208714, 9208715, 9208716, 9208717, 9208718, 9208719, 9208720, 9208721, 9208722, 9208723, 9208724, 9208725, 9208726, 9208727, 9208728, 9208729, 9208730, 9208731, 9208732, 9208733, 9208734, 9208735, 9208736, 9208737, 9208738, 9208739, 9208740, 9208741, 9208742, 9208743, 9208744, 9208745, 9208746, 9208747, 9208748, 9208749, 9208750, 9208751, 9208752, 9208753, 9208754, 9208755, 9208756, 9208757, 9208758, 9208759, 9208760, 9208761, 9208762, 9208763, 9208764, 9208765, 9208766, 9208767, 9208768, 9208769, 9208770, 9208771, 9208772, 9208773, 9208774, 9208775, 9208776, 9208777, 9208778, 9208779, 9208780, 9208781, 9208782, 9208783, 9208784, 9208785, 9208786, 9208787, 9208788, 9208789, 9208790, 9208791, 9208792, 9208793, 9208794, 9208795, 9208796, 9208797, 9208798, 9208799, 9208800, 9208801, 9208802, 9208803, 9208804, 9208805, 9208806, 9208807, 9208808, 9208809, 9208810, 9208811, 9208812, 9208813, 9208814, 9208815, 9208816, 9208817, 9208818, 9208819, 9208820, 9208821, 9208822, 9208823, 9208824, 9208825, 9208826, 9208827, 9208828, 9208829, 9208830, 9208831, 9208832, 9208833, 9208834, 9208835, 9208836, 9208837, 9208838, 9208839, 9208840, 9208841, 9208842, 9208843, 9208844, 9208845, 9208846, 9208847, 9208848, 9208849, 9208850, 9208851, 9208852, 9208853, 9208854, 9208855, 9208856, 9208857, 9208858, 9208859, 9208860, 9208861, 9208862, 9208863, 9208864, 9208865, 9208866, 9208867, 9208868, 9208869, 9208870, 9208871, 9208872, 9208873, 9208874, 9208875, 9208876, 9208877, 9208878, 9208879, 9208880, 9208881, 9208882, 9208883, 9208884, 9208885, 9208886, 9208887, 9208888, 9208889, 9208890, 9208891, 9208892, 9208893, 9208894, 9208895, 9208896, 9208897, 9208898, 9208899, 9208900, 9208901, 9208902, 9208903, 9208904, 9208905, 9208906, 9208907, 9208908, 9208909, 9208910, 9208911, 9208912, 9208913, 9208914, 9208915, 9208916, 9208917, 9208918, 9208919, 9208920, 9208921, 9208922, 9208923, 9208924, 9208925, 9208926, 9208927, 9208928, 9208929, 9208930, 9208931, 9208932, 9208933, 9208934, 9208935, 9208936, 9208937, 9208938, 9208939, 9208940, 9208941, 9208942, 9208943, 9208944, 9208945, 9208946, 9208947, 9208948, 9208949, 9208950, 9208951, 9208952, 9208953, 9208954, 9208955, 9208956, 9208957, 9208958, 9208959, 9208960, 9208961, 9208962, 9208963, 9208964, 9208965, 9208966, 9208967, 9208968, 9208969, 9208970, 9208971, 9208972, 9208973, 9208974, 9208975, 9208976, 9208977, 9208978, 9208979, 9208980, 9208981, 9208982, 9208983, 9208984, 9208985, 9208986, 9208987, 9208988, 9208989, 9208990, 9208991, 9208992, 9208993, 9208994, 9208995, 9208996, 9208997, 9208998, 9208999, 9209000, 9209001, 9209002, 9209003, 9209004, 9209005, 9209006, 9209007, 9209008, 9209009, 9209010, 9209011, 9209012, 9209013, 9209014, 9209015, 9209016, 9209017, 9209018, 9209019, 9209020, 9209021, 9209022, 9209023, 9209024, 9209025, 9209026, 9209027, 9209028, 9209029, 9209030, 9209031, 9209032, 9209033, 9209034, 9209035, 9209036, 9209037, 9209038, 9209039





11. Pusat Sejarah Konstitusi (PUSKON)

Sebagai bagian dari fasilitas informasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi, Pusat Sejarah Konstitusi (PUSKON), menjadi bagian yang memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan informasi tentang konstitusi kepada publik. Pada tahun 2023 PUSKON sudah beroperasi secara penuh melayani kunjungan dari berbagai lapisan masyarakat.

Tahun 2022 pengunjung PUSKON tercatat sebanyak 1.228 orang, jumlah kunjungan masih dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan kunjungan yang masih mempertimbangkan dampak Covid 19 sehingga dianggap sebagai uji coba operasional PUSKON secara penuh. Pada Tahun 2023 mulai diberlakukan penerimaan kunjungan secara penuh tanpa batasan namun tetap memperhatikan pengaturan jumlah peserta kunjungan perkelompok. Sekalipun tetap diberlakukan pengaturan namun terbukti antusias masyarakat untuk memahami konstitusi melalui fasilitas informasi tentang sejarah konstitusi di PUSKON meningkat signifikan. Bukti ini ditunjukkan dengan catatan jumlah kunjungan selama Tahun 2023 yaitu sebanyak 7.642 orang.

Dilihat dari data kunjungan selama tahun 2023 ini, peserta kunjungan terdiri dari berbagai latar belakang dan lapisan masyarakat.

Tabel 19

Daftar Pengunjung Pusat Sejarah Konstitusi Tahun 2023

NO	NAMA UNIVERSITAS/SEKOLAH/ INSTANSI	TANGGAL KUNJUNGAN	WAKTU	JUMLAH
JANUARI				
1	F. Syariah dan Hukum Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	10 Januari 2023	07.30	50



2	ACICIS Australia	5 Januari 2023	09.00	37
3	FH. Univ. Muhammadiyah Yogyakarta	16 Januari 2023	08.00	150
4	FH. Univ. Muhammadiyah Magelang	17 Januari 2023	09.00	134
5	Institut Pendidikan Indonesia Garut	24 Januari 2023	09.30	60
6	Pusat Studi Konstitusi dan Anti-Korupsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	30 Januari 2023	09.00	25
7	SIS Kelapa Gading	30 Januari 2023	13.00	9
	JUMLAH			465
FEBRUARI				
1	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat	1 Februari 2023	10.00	10
2	Mahasiswa Magang MK	1 Februari 2023	13.30	30
3	PERADI	2 Februari 2023	14.30	50
4	Universitas Esa Unggul Bekasi	9 Februari 2023	08.00	65
5	ANRI	9 Februari 2023	11.00	10
6	UIN Sunan Kalijaga	13 Februari 2023	11.00	50
7	SDN Krukut 3 Depok	14 Februari 2023	11.00	12
8	Audiensi UGM	14 Februari 2023	11.00	10



9	MIS Ruhul 'Ulum Jagakarsa	14 Februari 2023	13.00	173
10	STIH PERTIBA Pangkalpinang	21 Februari 2023	10.00	58
11	UIN Fatmawati Sukarno BENGKULU	22 Februari 2023	14.00	40
12	FH dan Ilmu Sosial Univ. Pendidikan Ganesha, Bali	27 Februari 2023	14.00	124
13	F. Syariah UIN Raden Intan Lampung	28 Februari 2023	09.00	13
	JUMLAH			645
MARET				
1	Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Law Faculty of University of Malaya	1 Maret 2023	11.00 WIB	35
2	FH Univ.Islam As-Syafi'iyah	7 Maret 2023	10.00 WIB	30
3	Sekolah Global Mandiri	13 Maret 2023	09.00 WIB	59
4	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	29 Maret 2023	10.00 WIB	10
	JUMLAH			134
APRIL				
	Puasa dan Lebaran ditutup			
MEI				
1	SMA Labschool Jakarta Sadhibrata Tadakara	9 Mei 2023	10.00 WIB	162



2	FH. UKI	10 Mei 2023	08.00 WIB	65
3	SMA Negeri 1 Padang	11 Mei 2023	09.00 WIB	10
4	SMAN 5 Tangerang	11 Mei 2023	10.00 WIB	190
5	F. Syariah IAIN PONOROGO	11 Mei 2023	13.00 WIB	52
7	SMPN 176 Jakarta	17 Mei 2023	08.00 WIB	88
8	FH Univ.Sebelas Maret Solo	17 Mei 2023	09.00 WIB	60
9	SMAN 1 Ciomas Cibinong	23 Mei 2023	10.00 WIB	420
	JUMLAH			1047
JUNI				
1	FH. Univ.Mhasaraswati Denpasar	6 Juni 2023	10.00 WIB	167
2	UIN Salatiga Prodi Hukum Keluarga Islam	7 Juni 2023	09.00 WIB	150
3	STISIP Widyapuri Mandiri	8 Juni 2023	13.00 WIB	154
4	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	12 Juni 2023	13.00 WIB	100
5	Univ. PGRI Wiranegara Fak. Pedagogi dan Psikologi	13 Juni 2023	08.00 WIB	33
6	UIN Salatiga Prodi Hukum Ekonomi Syariah	13 Juni 2023	13.00 WIB	183



7	SMA Al Furqon Tangerang	15 Juni 2023	13.00 WIB	50
8	UIN Salatiga Prodi Hukum Tata Negara	19 Juni 2023	09.00 WIB	147
9	Balitbang Mahkamah Agung	20 Juni 2023	11.00 WIB	10
10	UIN Salatiga Prodi Hukum Keluarga Islam	21 Juni 2023	09.00 WIB	150
11	FH Univ. Sahid	21 Juni 2023	13.00 WIB	155
12	Asosiasi Sekolah Hukum Korea	27 Juni 2023	10.00 WIB	13
	JUMLAH			1312
JULI				
1	FH. Univ. Muhammadiyah Sukabumi	4 Juli 2023	09.00	109
2	Universitas IVET Semarang	4 Juli 2023	13.00	65
3	Fakultas Syariah, Ekonomi, dan Bisnis Islam Universitas Ma'arif Lampung	5 Juli 2023	08.00	47
4	UIN Jakarta	12 Juli 2023	10.00 WIB	10
5	Univ. Indonesia	20 Juli 2023	08.30 WIB	12
6	World Student Christian Federation Asia Pasific Region	20 Juli 2023	12.30 WIB	30
7	ALSA UGM	25 Juli 2023	08.00 WIB	50



8	Hukum Online (Audiensi)	27 Juli 2023	11.00 WIB	7
9	FH. Univ. Muhammadiyah Palembang	31 Juli 2023	09.00 WIB	100
10	FH. Universitas Madura	31 Juli 2023	09.00 WIB	60
11	PERMAHI Tangerang	31 Juli 2023	13.00 WIB	25
	JUMLAH			515
AGUSTUS				
1	FH. Univ. Muhammadiyah Bengkulu	1 Agustus 2023	09.00	87
2	FH. Univ. Bandar Lampung	1 Agustus 2023	13.00	100
3	Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara FH Universitas Hasanuddin	10 Agustus 2023	14.00	25
4	SMA Bunda Hati Kudus (Kelas XII)	21 Agustus 2023	08.30	118
5	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	22 Agustus 2023	08.00	145
6	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Audiensi)	31 Agustus 2023	10.00	3
	JUMLAH			478
SEPTEMBER				
1	Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal	4 September 2023	14.00	54



2	SMA Bunda Hati Kudus (Kelas X)	5 September 2023	08.30	128
3	KPK RI	5 September 2023	14.00	3
4	IFES	11 September 2023	14.30	4
5	SMA Bunda Hati Kudus (Kelas XI)	14 September 2023	08.30	119
6	Fomaksi Aliyah Sukabumi	14 September 2023	11.00	120
7	Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata	14 September 2023	13.30	193
8	IPI Garut	19 September 2023	09.30	20
9	SD Al Bayan Islamic School	26 September 2023	09.00	110
10	FH. Universitas Bengkulu	27 September 2023	13.00	139
	JUMLAH			890
OKTOBER				
1	SMA Annajah Bogor	4 Oktober 2023	10.00	50
2	Kemenpora - Pendidikan Kader Pemimpin Muda Nasional (PKPMN)	4 Oktober 2023	13.00	110
3	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	5 Oktober 2023	09.00	90
4	Komnas HAM	9 Oktober 2023	10.00	11



5	Majelis Permusyawaratan Rakyat	10 Oktober 2023	10.00	10
6	Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	10 Oktober 2023	13.00	45
7	Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan	12 Oktober 2023	10.00	8
8	SMP Islam Athirah Sulawesi Selatan	12 Oktober 2023	13.00	129
9	FH. Undip	18 Oktober 2023	09.00	50
10	FH Universitas Kristen Satya Wacana	18 Oktober 2023	13.00	50
11	FH Univ. Mahasaraswati Denpasar	23 Oktober 2023	09.00	185
12	SMAN 53 Jakarta	26 Oktober 2023	09.00	125
13	BEM KM FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	30 Oktober 2023	13.00	200
14	SMK 1, Jakarta Pusat Jl. Abdul Muis	31 Oktober 2023	10.00	125
	JUMLAH			1188
NOVEMBER				
1	SMA Muhammadiyah 1 Gresik Jawa Timur	1 November 2023	09.00	192
2	Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya	7 November 2023	09.00	105



3	SMA Sekolah Anak Indonesia	14 November 2023	13.30	82
4	Sekolah Tinggi Hukum Bandung	14 November 2023	09.00	109
5	UIN Jakarta	15 November 2023	13.00	40
6	SMP NOAH Jakarta	16 November 2023	09.00	62
7	FH. BEM UPN Veteran Jawa Timur	21 November 2023	09.00	210
8	FH Universitas Katolik Parahyangan	23 November 2023	10.00	50
9	MGMP PPKn Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau	27 November 2023	09.00	30
	JUMLAH			880
DESEMBER				
1	Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro Lampung	11 Desember 2023	09.00	38
2	Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan	14 Desember 2023	09.00	50
	JUMLAH			88
	JUMLAH PENGUNJUNG TAHUN 2023			7642 Orang



12. Pengunjung Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan Perpustakaan khusus yang terbuka untuk umum dengan mengoleksi informasi tentang Hukum dan Tata Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi Negara serta Sejarah dan Biografi dalam bentuk koleksi cetak maupun digital. Perpustakaan merupakan unit pendukung referensi dalam penanganan perkara konstitusi bagi Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti, ASLI dan pegawai di Mahkamah Konstitusi, dengan peran seperti itu Perpustakaan Mahkamah Konstitusi secara organisasi berada dibawah Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Sekretariat Jenderal MKRI.

Rincian Kunjungan Perpustakaan kita mulai dari Tahun 2022- 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 20
Laporan Statistik Pengunjung Perpustakaan MKRI Tahun 2022

No	Bulan	Pengunjung	Peminjam	Jumlah Pengunjung & Peminjam
1	Januari	3	6	9
2	Februari	2	24	26
3	Maret	15	69	84
4	April	4	7	11
5	Mei	4	14	18
6	Juni	94	94	188
7	Juli	52	95	147
8	Agustus	48	82	130



9	September	83	36	119
10	Oktober	135	62	197
11	Nopember	107	39	146
12	Desember	53	11	64
JUMLAH				1139

Tabel 21

Laporan Statistik Pengunjung Perpustakaan MKRI Tahun 2023

No	Bulan	Pengunjung	Peminjam	Jumlah Pengunjung & Peminjam
1	Januari	114	5	114
2	Februari	226	13	226
3	Maret	104	25	104
4	April	80	6	80
5	Mei	147	11	147
6	Juni	134	6	134
7	Juli	136	11	137
8	Agustus	159	5	160
9	September	104	10	114
10	Oktober	141	19	160
11	Nopember	114	18	132



12	Desember	79	17	96
JUMLAH				1604

13. Pencapaian Zona Integritas

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai perwakilan dari Mahkamah Konstitusi yang memperoleh penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, pada Rabu 6 Desember 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua KPK Nawawi Pomolongo.

Terdapat beberapa kategori penghargaan yang diserahkan, antara lain:

- Pemerintah Daerah dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada semua tema Tahun 2023
- Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan nilai SAKIP menjadi A pada Tahun 2023
- Predikat SAKIP AA
- Apresiasi K/L pendukung dalam Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023
- Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Terbanyak peraih Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023







KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

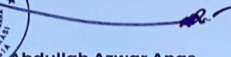
PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN (PUSLITKA)

Unit kerja ini telah meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Apabila dikemudian hari ditemukan praktek pungutan liar, calo, gratifikasi
dan aduan atas unit kerja, masyarakat dapat melaporkan melalui lapor.go.id



Jakarta, 27 November 2023

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Abdullah Azwar Anas





2023

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIP) Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Puslitka.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Puslitka Tahun 2023, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Beberapa kinerja tercapai melebihi target yang telah ditetapkan akan kami reviu untuk tahun yang akan datang dalam membuat target yang akan dicapai. Untuk indikator kinerja yang belum mencapai target setelah kami identifikasi penyebabnya akan kami lakukan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Demikian LAKIP untuk tahun anggaran 2023 ini disusun, harapannya ini menjadi acuan bagi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik. Hal ini merupakan sebuah amanat perundang-undangan guna memberikan gambaran dan referensi bagi penyusunan rencana kinerja pada tahun berikutnya.

Selain itu, Lakip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Jakarta, 5 Februari 2024

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Pan Mohamad Faiz Kusuma W.



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110
Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id

